GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 17/12/2004**

Subyek : **Hari : Jumat**

Kata Kunci : **Halaman : 9**

Pemerintah Diharapkan Undang Pakar Internasional soal Buyat

JAKARTA (Media): Pihak PT Newmont Minahasa Raya (NMR) mengimbau pemerintah Indonesia mengundang pakar internasional dan lembaga independen untuk mengkaji ulang laporan Tim Teknis Penanganan Pencemaran Teluk Buyat, Sulawesi Utara.Pihak Newmont menilai banyak laporan yang salah interpretasi dan asumsi yang tidak realistis. Robert Gallagher, Vice President of Newmont Indonesia Operation, mengatakan hal itu kepada pers menanggapi laporan Tim Terpadu Penanganan Pencemaran Teluk Buyat di Jakarta, kemarin. Hadir pada acara ini Imelda Adi Saputra, Environmental Manager PT NMR, dan Luhut Pangaribuan, pengacara PT NMR.

Sebelumnya, Ketua Tim Teknis Penanganan Pencemaran Teluk Buyat *Masnellyarti Hilman* melaporkan bahwa hasil penelitian menyimpulkan Teluk Buyat di Minahasa Selatan itu telah tercemar logam berat arsenik yang berasal dari pembuangan tailing dari PT NMR.Menanggapi laporan tim terpadu, Gallagher mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan data-data yang dikumpulkan tim terpadu. Alasannya, hasil pemantauan tim terpadu konsisten dengan pihak PT NMR. "Namun kami sangat keberatan dengan interpretasi atas data-data tersebut," katanya.

Gallagher menilai interpretasi dan asumsi laporan tim teknis sangat bias. Walaupun tim teknis sudah mengakui bahwa kadar logam berat pada ikan dan perairan Teluk Buyat lebih rendah dari standar. Tetapi laporan tim teknis tetap mengambil kesimpulan telah terjadi pencemaran. Berkaitan dengan ini, kemarin, PT NMR melalui Luhut Pangaribun, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sehubungan dengan ditahannya direksi perusahaan itu oleh Mabes Polri.

Direksi PT NMR yang ditahan karena diduga terlibat dalam kasus pencemaran Teluk Buyat adalah Richard Bruce Ness, Christian ED, Putra Wijayatri, William Long, dan Philip Turner. Luhut menilai penahanan Mabes Polri terhadap mereka tidak sah. (Drd/Sdk/J-3)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP